

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

Perlindungan terhadap hutan tentunya menjadi sebuah prioritas di era pemanasan global ini. Cuaca bumi sekarang ini tidak lagi se-stabil dahulu. Cuaca di beberapa Negara di Dunia sulit untuk di perkirakan. Suhu bumi semakin-lama semakin meningkat. Kelestarian hutan menjadi faktor penting dalam menghambat atau bahkan menghentikan pemanasan global. APP merupakan salah satu perusahaan yang di Klaim menyebabkan Indonesia kehilangan sejumlah besar wilayah hutannya. Keadaan tersebut tidak dapat terus diabaikan. Banyak pihak menentang APP sampai akhirnya APP mengeluarkan kebijakan yang diklaim ramah lingkungan yaitu Kebijakan Konservasi Lingkungan dengan *Zero Deforestation*. Sama sekali menghentikan deforestasi di Indonesia bukan merupakan perkara mudah. Walau demikian dalam satu dekade terakhir Greenpeace dan masyarakat sipil sekutu kami telah mencapai beberapa kemenangan. Banyak perusahaan telah setuju untuk membersihkan rantai pasokan mereka dari deforestasi. Golden Agri-Resources dan Asia Pulp & Paper, yang keduanya masing-masing merupakan produsen minyak kelapa sawit dan pulp dan kertas terbesar di Indonesia, telah berjanji tidak akan menghancurkan hutan hujan lagi. Pemerintah nasional, Uni Eropa dan PBB saat ini menganggap serius masalah deforestasi. Mereka telah memberlakukan beberapa Undang-Undang dan Peraturan yang bertujuan menghentikan perdagangan kayu ilegal dan membantu negara seperti Indonesia untuk berkembang secara berkelanjutan.

Skema sertifikasi seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Forest Stewardship Council (FSC) memiliki kekurangan, tapi mencoba untuk mendorong perubahan dalam rantai pasokan komoditi dengan mempermudah perusahaan untuk mengetahui apakah mereka memasok minyak kelapa sawit, kayu dan kertas yang berkelanjutan, dan membantu konsumen untuk mengerti apakah produk yang mereka beli terkait dengan penghancuran hutan hujan. Hasil-hasil ini sebagian adalah jasa anda. Tanpa dukungan aktif dan donasi dari ribuan individu yang berkomitmen dari seluruh dunia, Greenpeace tidak akan ada sebagai kekuatan untuk perubahan positif.

Namun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Moratorium izin baru di hutan dan lahan gambut yang baru diperbaharui di Indonesia harus ditegakkan dan diperluas untuk menyertakan hutan dan lahan gambut dalam konsesi yang ada. Korupsi masih merajalela. Di banyak wilayah, Kementerian Kehutanan mengeluarkan izin yang tumpang tindih yang membuatnya lebih sulit untuk memantau deforestasi di lapangan dan mengidentifikasi perusahaan mana yang bertanggung jawab. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak hutan dan lahan gambut Indonesia telah rusak atau terdegradasi parah. Kemenangan pada tahapan ini adalah kemenangan didapatkan dengan harga yang sangat mahal kecuali para perusahaan berkomitmen untuk memperbaiki dan mengkompensasi lahan yang mereka rusak.

Kebijakan ini tujuannya ingin menghentikan pembukaan lahan hutan alam. Semua produksi dari APP akan menggunakan bahan kayu industri. Kebijakan ini disambut baik oleh beberapa pihak termasuk salah satunya INGO yang selama ini

paling gencar mengkampanyekan anti-deforestasi yaitu Greenpeace. Dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan APP akhirnya mau merealisasikan Kebijakan Konservasi Hutan ini adalah **Pertama**, ketegasan pemerintah dalam memberikan aturan penebangan hutan alam. Pemerintah sudah dua kali melakukan kebijakan momoratorium penghentian deforestasi. Pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap APP juga merupakan salah satu bentuk dukungan yang diberikan kepada APP untuk tidak lagi membuka lahan alam di Indonesia. Namun usaha pemerintah dinilai belum maksimal, karena instruksi penundaan lahan hanya berlaku untuk 2 tahun kedepan. Tidak berlaku bagi perizinan lahan sebelum komitmen ini di sah kan. Sedangkan izin pembukaan lahan di tahun sebelumnya sudah cukup banyak untuk di kategorikan sebagai penyebab deforestasi hutan **Kedua**, adanya tekanan dari sejumlah INGO lingkungan yang salah satunya adalah Greenpeace. Aksi yang dilakukan oleh kelompok INGO bermacam macam, mulai dari kampanye penolakan APP, melakukan investigasi langsung dilapangan, dan melakukan control terhadap pergerakan APP dalam pengelolaan hutan, sampai dengan memaksa klien-klien APP untuk memutuskan hubungan kerja-sama dengan APP. Greenpeace sebagai organisasi internasional tidak memiliki banyak wewenang dalam pembuatan kebijakan terhadap APP. Greenpeace hanya sebatas memberikan peringatan dan kampanye terhadap perusahaan yang ikut terlibat agar berhenti bekerja sama dengan perusahaan yang terlibat deforestasi. Namun, aksi Greenpeace ini di nilai cukup berpengaruh terhadap perusahaan yang memutuskan kerjasamanya dengan APP. **Faktor** terakhir yang tidak kalah berperan adalah peran dari konsumen APP

(Pasar/Investor) yang pada akhirnya menolak menggunakan bahan kertas yang berasal dari serat kayu hutan alam. Hal ini yang tentunya juga menjadi tamparan keras bagi APP, selain dari mendapat kecaman dari banyak pihak juga kehilangan klien paling setia yang tentunya mengurangi jumlah pemasukan perusahaan. Sebagai perusahaan skala besar yang telah kehilangan banyak perusahaan kerjasamanya, APP merasa pendapatan perusahaannya menurun. Sehingga APP harus segera membuat kebijakan baru agar perusahaan lain tidak turut memutuskan hubungan kerjasamanya dengan APP. Dari beberapa poin tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor penting yang membuat APP mengeluarkan Kebijakan Konservasi Hutan adalah pemutusan hubungan kerjasama dengan beberapa perusahaan besar.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Dengan adanya kebijakan Konservasi Hutan ini tentunya kondisi lapangan diharapkan sesuai dengan pernyataan yang dikeluarkan maka pemerintah juga perlumelakukan pengawasan ketat untuk mngontrol jalannya kebijakan tersebut, tidak hanya berpangku tangan.

2. Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat lingkungan

LSM Lingkungan tentunya harus terus menyuarakan teriakan anti deforestasi tidak hanya kepada APP namun juga kepada piha lain selain APP yang juga berkontribusi dalam kerusakan hutan di Dunia khususnya di Indonesia. kontrol di lapangan dalam mengawal kebijakan ini sangat diperlukan. Sehingga

peran dari LSM lingkungan menjadi ujung tombak terlaksananya kebijakan ini dengan tepat sasaran.

3. Bagi Asia Pulp and Paper

APP tentunya mendapatkan apresiasi yang sangat besar dari banyak pihak dengan adanya kebijakan Konservasi Hutan ini. Hal yang seharusnya dilakukan APP adalah memastikan sampai pada level implementor kebijakan bahwa kebijakan Konservasi Hutan ini terlaksana dengan baik.